



**LAPORAN PERKEMBANGAN
MENGENAI
PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
PADA
RAPAT KONSULTASI PENGGANTI BAMUS DPR RI
JAKARTA, 19 MEI 2021**



KOMISI VIII DPR RI



**LAPORAN PERKEMBANGAN
MENGENAI
PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

=====

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.

- **Yang terhormat Pimpinan DPR RI,**
- **Yang terhormat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi DPR RI; serta**
- **Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali penyampaian Laporan Perkembangan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir pada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada hari ini.

Sebagaimana kita ketahui dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memiliki tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas pembahasan rancangan undang undang, Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang Undang memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang undang kepada Badan Musyawarah DPR RI.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana yang sampai saat ini masih dibahas di Komisi VIII DPR RI.

Hadirin yang kami hormati.

Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Terkait dengan itu, Pimpinan DPR RI dalam surat bernomor: PW/09997/DPR RI/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 menugaskan kepada Komisi VIII DPR RI untuk membahas rancangan undang undang tersebut.

Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana ini telah dibahas di Komisi VIII DPR RI mulai dari Masa Persidangan I, II dan III Tahun Sidang 2020-2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Musyawarah tanggal 7 September 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI. Rapat Kerja Musyawarah ini menyepakati DIM yang akan dibahas oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sebanyak 591 DIM.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI tanggal 17 September 2020 Dengan Direktur *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Pimpinan Aliansi Masyarakat Untuk Penguatan Undang-undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB), *The Smeru Research Institute*, Pimpinan Sekretariat Jaringan Antar Jaringan OMS-LSM (Sejajar), Pimpinan Pujiono Center, Pimpinan *Amcolabora Learning and Research Institute*, Pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pimpinan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Yappika, Koordinator Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, Pimpinan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (PMBI).
3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI tanggal 24 September 2020 dengan Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI tanggal 16 November 2020 dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri PAN dan RB RI mengenai

penghapusan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam DIM Pemerintah.

5. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI tanggal 24 November 2020 dengan Kepala BPBD Jabar, Kepala BPBD Banten, Kepala BPBD DKI Jakarta, Kepala BPBD NTB dan Kepala BPB Aceh.
6. Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana ke beberapa daerah di wilayah Indonesia.
7. Rapat Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah pada tanggal 20 Januari 2020 untuk membahas DIM dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. DIM yang berstatus TETAP berjumlah 371 DIM.
 - b. DIM yang berstatus DIHAPUS berjumlah 70 DIM.
 - c. DIM yang berstatus PERUBAHAN SUBSTANSI berjumlah 19 DIM.
 - d. DIM yang berstatus PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU/RUMUSAN BARU berjumlah 27 DIM.
 - e. DIM yang berstatus PERUBAHAN REDAKSIONAL berjumlah 104 DIM.
 - f. DIM tanpa status 1 DIM.

Kemudian, pada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 9 Februari 2021 kami sudah mengajukan perpanjangan masa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Namun sehubungan dengan RUU Prioritas Tahun 2021 baru ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 23 Maret 2021 atau telah mendekati penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 maka Komisi VIII DPR RI belum dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI tanggal 17 Mei 2021 disepakati bahwa Menteri Sosial akan berkonsultasi dengan Presiden RI mengenai keinginan fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mencantumkan nomenklatur BNPB dan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD sebesar 2 persen dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Sesuai ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pada Pasal 152 Ayat (1) bahwa "**Pembahasan Rancangan Undang-**

Undang sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI sesuai dengan permintaan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus”, maka Komisi VIII DPR RI mengusulkan perpanjangan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itulah kami mengusulkan kepada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI untuk mengagendakan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana oleh Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Demikian laporan perkembangan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami menghaturkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 19 Mei 2021

KETUA PANJA KOMISI VIII DPR-RI

MENGENAI RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.